

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara kesatuan, dalam menyelenggarakan sistem ekonomi daerah pemerintah membagi wilayahnya menjadi beberapa daerah, mulai dari yang teratas pemerintah pusat, turun kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, masing-masing daerah ini saling berhubungan satu dengan lainnya. Dalam menyelenggarakan pemerintah daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemerintah melakukan otonomi daerah dengan tujuan untuk memberikan sebuah kewenangan kepada pemerintah daerah agar mengurus serta mengatur seluruh urusan pemerintahannya diluar urusan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengembangkan segala bentuk potensi yang dimiliki dalam rangka membangun daerahnya.

Dalam Negara Kesatuan Pemerintah pusat memiliki wewenang secara penuh dalam wilayah negara meskipun wilayah negara tersebut dibagi dalam bagian-bagian negara, akan tetapi bagian negara tersebut tidak mempunyai kekuasaan asli. Oleh karena itu, dalam Negara Kesatuan sesungguhnya masih terbuka inisiatif daerah dan peranan Pemerintah Daerah untuk memperjuangkan nasib daerahnya masing-masing. Namun harus tetap berkoordinasi dengan Pemerintah pusat, dalam hal ini sering dilahirkan konsep desentralisasi yang bertujuan untuk mendelegasikan

sebagian tugas Pemerintah Negara Kesatuan kepada daerah terhadap hal yang dipandang sudah tepat untuk pemerintah daerah mengurus sendiri urusannya.²

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 1999. Sistem desentralisasi merupakan sebagian dari kewenangan pemerintah pusat yang dipindah alihkan kepada Pemerintah Provinsi, untuk diwujudkan dalam bentuk otonomi daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam bentuk pengaturan daerah, termasuk pelaksanaan pembangunan daerah.³ Otonomi daerah merupakan sebuah konsep yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Otonomi daerah mengacu pada sistem dimana pemerintah daerah, seperti provinsi, kabupaten, dan kota diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan serta kondisi daerah masing-masing.

Otonomi daerah merupakan sebuah hak, wewenang serta kewajiban daerah otonom untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya sendiri serta kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan pelaksanaan desentralisasi

² M Agus Santoso, "Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal Ilmu Administrasi* 6 (2009): 413–25, <http://180.250.247.102/index.php/jia/article/view/361/334>.

³ berti Indah Sari and Halmawati, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat," *Jurnal Ekplorasi Akutansi* 3, no. 1 (2021): 56–60, <https://doi.org/10.4324/9781003322603-5>.

tergantung kepada desain, proses implementasi, dukungan politis pada saat pengambilan keputusan di masing-masing tingkat pemerintah, ataupun masyarakat secara keseluruhan, kesiapan pemerintah, pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia, mekanisme koordinasi untuk meningkatkan kinerja aparat birokrasi, perubahan sistem nilai dan perilaku birokrasi dalam memenuhi keinginan masyarakat khususnya dalam pelayanan sector publik.⁴

Dalam otonomi daerah pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan-urusan tertentu tanpa campur tangan langsung dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah, mengelola anggaran, dan merencanakan pembangunan. Tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah agar lebih mandiri dalam mengelola sumber daya dan kebijakan, serta untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola dan memperoleh pendapatan daerah seperti pajak daerah dan retribusi, serta mendapatkan dana alokasi dari pemerintah pusat. Akan tetapi, kewenangan ini harus disertai dengan tanggung jawab untuk menggunakan dana tersebut secara efektif.

⁴ M Khusaini, *Keuangan Daerah* (UB Press, 2018), <https://books.google.co.id/books?id=VOmIDwAAQBAJ>.

Campur tangan pemerintah pusat melalui dana transfer ke pemerintah daerah melalui konteks desentralisasi fiskal mempunyai tujuan yaitu untuk meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Selain itu desentralisasi fiskal bertujuan agar pemerintah daerah tidak menggantungkan dana kepada pemerintah pusat. Desentralisasi fiskal dapat mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi penerimaan asli daerah. Tetapi, masih banyak pemerintah daerah yang belum dapat mencapai kondisi tersebut. Pemerintah daerah dianggap belum maksimal dalam mengalokasikan anggaran dikarenakan kurangnya kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan penerimaan pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah.

Menurut Osro, proses desentralisasi akan berhasil paling tidak lima kondisi sebagai berikut: (a) kerangka desentralisasi harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kewenangan fiskal dalam menjamin penyediaan *public service* dan penyelenggaraan pemerintah daerah. (b) masyarakat harus diberikan informasi yang jelas mengenai berapa biaya *service delivery* dan beberapa pilihan sumberdaya yang akan digunakan. (c) harus ada mekanisme yang jelas untuk masyarakat agar dapat mengekspresikan keinginan-keinginan kepada elit politik local sehingga masyarakat aktif dalam pembangunan daerah. (d) harus mempunyai system *public accountability* yang dapat menjamin transparansi publik, informasi yang transparan kepada masyarakat dapat melakukan fungsi control kepada

pemerintah daerah. (e) sistem *intergovernmental transfer* dan struktur fiskal harus tertata dengan jelas.⁵ Dengan diterapkannya otonomi daerah menyebabkan keuangan daerah harus dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah yang bertujuan agar proses dari pembangunan dapat diselesaikan dengan cepat tanpa harus menunggu bantuan pendanaan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu pengukuran kinerja keuangan pemerintah sangat penting dilakukan.

Otonomi daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja keuangan setiap Pemerintah Daerah. dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih luas dalam mengelola sumber daya serta keuangannya sendiri tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan efektivitas dalam pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu Pemerintah Daerah yang sudah melaksanakan otonomi daerah adalah Kabupaten Blitar.

Kabupaten Blitar, memiliki beragam potensi dan kekayaan yang tidak hanya terbatas pada sumber daya alam dan potensi hasil bumi yang melimpah, tetapi juga mencakup sector peternakan dan perikanan. Selain itu, kekayaan budaya dan peninggalan sejarah dengan nilai adiluhung menjadi aset berharga yang tak ternilai. Dukungan terhadap kemudahan perizinan serta iklim investasi yang kondusif, diperkuat oleh stabilitas sosial dan politik, menjadi modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

⁵ Moh.Khusaini, "*Keuangan Daerah*",..., hal. 23-24.

Faktor-faktor ini menjadi aspek krusial yang memberikan jaminan bagi investor dan seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan Kabupaten Blitar. Apabila pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan berbagai potensi yang dimiliki, hal ini akan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah, dengan demikian, efektivitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah dapat terlihat secara nyata. Oleh karena itu, pemanfaatan potensi tersebut secara tidak langsung berperan dalam mendukung perbaikan dan peningkatan keuangan daerah.⁶

Meskipun Kabupaten Blitar memiliki beragam potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah, masih terdapat permasalahan yang menghambat optimalisasi pendapatan daerah. Permasalahan utamanya yaitu belum maksimalnya pengelolaan sector unggulan seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata. Pada sektor pertanian dan peternakan permasalahan yang sering dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur dan fluktuasi harga hasil pertanian serta peternakan yang tidak stabil, sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. Sementara, pada sektor pariwisata yang berpotensi menjadi salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum dikembangkan secara optimal. Seperti situs peninggalan sejarah candi Penataran yang masih mengalami kendala dalam hal promosi,

⁶ Ni Putu et al., "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah," *E-Jurnal Manajemen* 7, no. 2 (2018): 1080–1110.

pengelolaan, serta fasilitas pendukung yang belum memadai. Akibatnya, kunjungan wisata belum mencapai angka yang diharapkan sehingga kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD masih terbatas. Sehingga Kabupaten Blitar dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensinya secara lebih maksimal agar menjadi solusi untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Perkembangan anggaran pendapatan Kabupaten Blitar dari tahun 2019-2023 mengalami fluktuatif dimana dalam kurun waktu tersebut terjadi pandemic Covid-19 yang menyebabkan pendapatan tidak stabil. Rincian anggaran pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam lima tahun terakhir tergambar pada table 1.1 dibawah ini.

Gambar 1.1

**Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar
Tahun 2019-2023**



Sumber: LRA Kabupaten Blitar, (diolah oleh peneliti)

Berdasarkan tabel 1.1 diperoleh informasi bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar mengalami kenaikan pada tahun 2021. Dijelaskan

pada 2019 Rp 285.742.715.698,86 mengalami kenaikan di tahun 2020. Tahun 2020 PAD sebesar Rp 302.540.062.676,13 mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar Rp 407.530.973.690,43. Sementara pada tahun 2022 mengalami kenaikan Rp 422.738.491.399,68. Pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp 411.642.913.437,44 terjadinya fluktuasi dalam PAD menjadi dasar peneliti untuk menganalisis lebih dalam mengenai kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Blitar menjadi aspek krusial yang perlu diteliti, mengingat fenomena yang telah diidentifikasi menunjukkan perlunya alat ukur yang efektif. Sehingga dapat menilai sejauh mana pencapaian dan kendala dalam pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan tujuan otonomi daerah secara optimal.

Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan berbagai studi penelitian yang berhubungan dengan analisis kinerja keuangan khususnya pada pemerintah daerah. Beberapa dapat ditemui dalam penelitian yang dilakukan oleh Rizki Sari Eka Putri dan Agus Munandar pada Pemerintah Daerah Kota Malang tahun 2016-2020 menggunakan lima rasio keuangan yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi dan efektivitas PAD, rasio belanja langsung dan belanja tidak langsung, dan rasio pertumbuhan PAD, pendapatan, dan belanja.⁷ Vici Anjela Keintjem dan Sri Murni meneliti pada Pemerintah Kabupaten

⁷ Rizki S. E. Putri and Agus Munandar, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kotamalang Tahun Anggaran 2016-2020," *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi* 5, no. 3 (2021): 2296–2313.

Banggai Laut tahun 2017-2019 dengan menggunakan 4 rasio keuangan yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio pertumbuhan PAD, dan rasio belanja modal.⁸ Miftakur Rohmad, As'ad Isma, dan Fauzana Ramli meneliti pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo dengan menggunakan tiga rasio keuangan yaitu rasio kemandirian keuangan, rasio efisiensi keuangan daerah, dan rasio keserasian.⁹

Kajian penelitian ini, peneliti mencoba menganalisis serupa untuk memperoleh bukti empiris bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada era otonomi daerah, sebagaimana yang dijelaskan pada penulisan sebelumnya yang sudah dilakukan diberbagai daerah dengan waktu yang berbeda, memberikan informasi yang beragam dan memiliki karakteristik yang unik, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti Kabupaten Blitar dalam waktu yang dibatasi yaitu 2019-2023. Dengan mempertimbangkan berbagai latarbelakang, periode waktu, dan objek yang dipilih, penelitian ini diharapkan bermanfaat serta dapat menjadi referensi bagi daerah lain.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya terletak pada periode penelitian dengan tahun terbaru dan indikator untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan mengenai analisis kinerja keuangan pemerintah daerah, sekaligus memperkuat temuan

⁸ Vici Anjela Keintjem dan Sri Murni, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2017- 2019," *Junal Emba* 10, no. 33 (2019): 953–62.

⁹ Miftakur Rohmad, As'ad Isma, and Fauzan Ramli, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo," *Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2023): 17–35, <https://doi.org/10.55681/ecoma.v1i3.23>.

penelitian sebelumnya. Setiap daerah dalam kurun waktu yang berbeda akan menghasilkan pencapaian kinerja yang bervariasi. Sehingga, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengukur serta mengevaluasi kinerja keuangan, untuk Kabupaten lain maupun secara khusus dalam tata kelola keuangan pemerintah Kabupaten Blitar.

Pengukuran kinerja pemerintah daerah memerlukan ukuran penilaian yang kompleks karena variabel-variabel yang digunakan sangat beraneka ragam dan menggunakan berbagai metode pengukuran sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah tidak dapat hanya diukur dengan satu variabel.¹⁰ Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah berperan penting dalam mengevaluasi serta memperbaiki efektivitas dan efisiensi pelaksanaan keuangan daerah. Proses evaluasi dilakukan dengan membandingkan skema kerja yang telah dirancang dengan realisasi pelaksanaannya, sehingga dapat mengidentifikasi kendala serta potensi perbaikan dalam pengelolaan keuangan. Pengukuran ini juga berfungsi sebagai tolak ukur dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya, guna untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi penggunaan sumber daya keuangan demi kepentingan masyarakat secara lebih efektif.

Salah satu indikator untuk mengukur kinerja adalah melakukan analisis rasio keuangan. Menurut Mahmudi, rasio keuangan merupakan

¹⁰ Ni Putu Gina Sukma Antari dan Ida Bagus Panji Sedana., “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah,” *E-Jurnal Manajemen* 7, no. 2 (2018): 1080–1110.

perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan.¹¹ Dasar yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio efisiensi, rasio efektivitas PAD, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio pertumbuhan, dan rasio derajat desentralisasi.

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Blitar. Selain itu, peneliti ingin menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah Kabupaten Blitar disusun dan dipublikasikan secara transparan. Diharapkan penelitian dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah untuk periode mendatang. Serta peneliti ingin menganalisis sejauh mana perkembangan pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Blitar dengan menggunakan alat analisis rasio. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian membahas masalah dengan mengangkat judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan dalam penulisan ini, yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya. Ada beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

¹¹ Riska Wulandari, Baiq Anggun Hilendri Lestari, and Adithya Bayu Suryantara, “Analisis Rasio Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram,” *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 3, no. 2 (2023): 56–69, <https://doi.org/10.29303/risma.v3i2.657>.

1. Sumber daya alam, budaya, dan pariwisata yang terdapat pada Kabupaten Blitar belum dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Daerah yang akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
2. Kurangnya pemanfaatan potensi daerah berpengaruh terhadap rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dapat menghambat pembangunan dan pelayanan publik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan permasalahan, maka permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tahun 2019-2023 jika dilihat dari Rasio Efisiensi?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tahun 2019-2023 jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD?
3. Bagaimana kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tahun 2019-2023 jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah?
4. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tahun 2019-2023 jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan?
5. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tahun 2019-2023 jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tahun 2019-2023 jika dilihat dari Rasio Efisiensi.
2. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tahun 2019-2023 jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD.
3. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tahun 2019-2023 jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
4. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tahun 2019-2023 jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan.
5. Untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tahun 2019-2023 jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan teori keuangan daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar yang dapat ditinjau dari Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan, serta Rasio Derajat Desentralisasi.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah

Kegunaan penelitian ini bagi pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perencanaan kebijakan keuangan daerah. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah

khususnya Kabupaten Blitar. Penelitian ini dapat mengetahui hasil kinerja dari pemerintah daerah Kabupaten Blitar berdasarkan perhitungan rasio dan analisis hasil penelitian ini, sehingga dapat dijadikan acuan untuk satuan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Blitar agar meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat serta menentukan arah dan strategi dalam perbaikan kinerja pemerintah daerah di masa yang akan datang.

b. Bagi Masyarakat

Kegunaan penelitian ini bagi masyarakat sebagai transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini dapat membantu masyarakat untuk memahami bagaimana pemerintah daerah khususnya Kabupaten Blitar dalam mengelola anggaran digunakan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Agar meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran dengan meningkatkan kesadaran publik terhadap laporan keuangan pemerintah. Sehingga, kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat di Kabupaten Blitar.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Kegunaan penelitian ini bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan kinerja keuangan daerah dalam periode yang lebih baru atau dalam konteks yang berbeda. Dengan temuan-temuan empiris dari

penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk diuji ulang atau pengembangan hipotesis baru diberbagai wilayah lain.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Adapun masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Blitar berdasarkan Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Derajat Desentralisasi. Sehingga, penelitian ini akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar serta efektivitas pengelolaan anggarannya.

2. Keterbatasan Penelitian

Agar penelitian ini terarah dan focus pada tujuan penelitian, perlu adanya pembatasan masalah agar hasil dari penelitian ini lebih akurat. Dengan memfokuskan menganalisis kinerja keuangan berdasarkan Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Derajat Desentralisasi. Terdapat keterbatasan masalah dalam penelitian ini. Pada penelitian ini hanya berfokus pada kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dalam periode 2019-2023, sehingga tidak mencakup dinamika keuangan daerah sebelum atau sesudah periode tersebut. Selain itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis kuantitatif menggunakan rasio keuangan tanpa menggali lebih dalam faktor non keuangan, seperti dampak

kebijakan atau aspek sosial yang mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.¹²

Sedangkan, analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu parameter yang digunakan dalam pengukuran kinerja pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka pengukuran kualitas dan kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah, digunakan analisis menggunakan teknik dan langkah yang tepat sehingga hasil analisis yang ada dapat dimanfaatkan oleh pihak terkait dalam pengambilan kebijakan keputusan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.¹³ Dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah didasarkan pada Rasio Keuangan. Rasio keuangan merupakan salah satu metode Analisa keuangan yang

¹² Abdul Rahman Nasir, *KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA: MEMBANGUN KEMANDIRIAN DAERAH MELALUI PENDAPATAN ASLI DAERAH* (CV. DOTPLUS Publisher, 2023), hal. 3. <https://books.google.co.id/books?id=HErnEAAAQBAJ>.

¹³ Anike Deswira, "Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar," *Akuntansi Dan Manajemen* 17, no. 1 (2022): 72–88, <https://doi.org/10.30630/jam.v17i1.181>.

digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan, dengan mengambil data dari laporan keuangan selama satu periode.¹⁴

Berikut rasio keuangan yang di pakai dalam penelitian ini:

a. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara total realisasi pengeluaran (belanja daerah) dengan realisasi pendapatan yang di terima.¹⁵

b. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio efektivitas PAD dapat dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya.¹⁶

c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan. Pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat

¹⁴ Talitha Ayu Maritza et al., “Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Keputusan Perusahaan,” *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi* 2, no. 3 (2022): 139–48, <https://doi.org/10.55606/jurimea.v2i3.177>.

¹⁵ M. Agung Satryo Utomo, “Analisis Penggunaan Ratio : Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, Aktivitas Dan Pertumbuhan Sebagai Alternatif Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemda DKI Jakarta,” *Jraa* 2, no. 3 (2015): 15–52.

¹⁶ Rigel Fathah, “Analisis Rasio Keuangan Untuk Penilaian Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul,” *Jurnal EBBANK: Jurnal Ilmiah Bidang Ekonomi Bisnis Dan Perbankan* 8, no. 1 (2017): 33–48.

yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumbu pendapatan yang diperlukan daerah.¹⁷

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.¹⁸

e. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi merupakan rasio yang menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD yang diukur dengan membandingkan antara PAD dengan total pendapatan APBD.¹⁹

2. Definisi Operasional

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu indikator untuk menilai efektivitas dan efisiensi dalam mengelola keuangan daerah guna untuk mencapai tujuan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Kinerja keuangan diukur melalui berbagai aspek seperti

¹⁷ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah (Ed. 3) Koran* (Penerbit Salemba, n.d.), hal. 232 <https://books.google.co.id/books?id=Qf4QHM1Mud0C>.

¹⁸ *ibid.*, hal. 241.

¹⁹ Yulistiani Marlianita dan Suji Abdullah Saleh, “Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi , Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah , Dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten / Kota Di Provinsi Jawa Barat,” *Indonesian Accounting Research Journal* 1, no. 1 (2020): 25–35, <https://jurnal-akuntansi.polban.ac.id/>.

rasio keuangan, pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan kemampuan daerah dalam membiayai kegiatannya.

Sedangkan, analisis kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas, efisiensi, dan kemandirian keuangan daerah dalam mengelola anggaran untuk mencapai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Analisis kinerja keuangan dapat dihitung dengan menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu entitas, termasuk pemerintah daerah dengan membandingkan berbagai komponen keuangan. Berikut rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah menggunakan sumber daya keuangan secara optimal dalam membiayai pengeluaran daerah. Rasio efisiensi dapat diperoleh dari perbandingan antara total belanja daerah dengan total pendapatan daerah.

b. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana realisasi PAD dibandingkan dengan target atau rencana yang telah ditetapkan dalam APBD. Rasio

efektivitas PAD dapat diperoleh dari perbandingan antara realisasi PAD dengan anggaran PAD.

c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Rasio kemandirian dapat diperoleh dari perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan dana transfer.

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan merupakan indikator untuk mengukur perkembangan pendapatan suatu daerah dari tahun ke tahun. Dalam penelitian ini menggunakan rasio pertumbuhan pendapatan dan rasio pertumbuhan belanja modal. Rasio pertumbuhan pendapatan dapat diperoleh dari pendapatan tahun sekarang dikurangi dengan pendapatan tahun kemarin dibagi dengan pendapatan tahun kemarin. Rasio pertumbuhan belanja modal dapat diperoleh dari belanja modal tahun sekarang dikurang dengan belanja modal tahun kemarin dan dibagi dengan belanja modal tahun kemarin.

e. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi merupakan indikator untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai kebutuhan daerahnya sendiri melalui PAD dibandingkan dengan total

pendapatan daerah. Rasio derajat desentralisasi dapat diperoleh dari perbandingan antara PAD dengan total pendapatan daerah.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB ini menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup, dan penegasan istilah.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada BAB ini menjelaskan tentang deskripsi variabel, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang pendekatan penelitian dan jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data, skala pengukuran, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan interpretasi hasil penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti menguraikan tentang pembahasan data penelitian dan hasil data.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti.

Bagian akhir dari laporan penelitian merupakan daftar Pustaka atau sumber-sumber penelitian dan lampiran yang berhubungan dengan penelitian.